

**Laporan Penelitian
Bisnis Militer
di Perusahaan
Pengeboran Minyak
Bojonegoro
Jawa Timur**

**TIM PENELITIAN
BISNIS MILITER BOJONEGORO**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
(KONTRAS)
FEBRUARI – MARET 2004**

Daftar Isi

BAB I. GAMBARAN UMUM	5
1.1. Kondisi Geografis Bojonegoro	5
1.2. Sejarah Singkat Kabupaten Bojonegoro	7
1.3. Metode	8
BAB II. SEJARAH INDUSTRI MINYAK DI BOJONEGORO	11
2.1. Ladang Minyak dan Perusahaan Minyak di Bojonegoro	11
2.2. Santa Fe, Devon, PetroChina di Bojonegoro	12
2.3. PT. Humpus Patragas dan Mobil Cepu Ltd.	13
BAB III. DINAMIKA PERAN MILITER DAN POLISI DALAM BISNIS INDUSTRI MINYAK DI BOJONEGORO	17
3.1. Stuktur militer dan kepolisian di Bojonegoro	17
3.2. Pembagian Keterlibatan Militer dan polisi dalam bisnis di Bojonegoro	17
3.3. Keterlibatan Militer dan Polisi di perusahaan minyak Bojonegoro yang illegal	18
3.4. Bentuk-bentuk ketelibatan	21
3.5. Aktor-aktor yang terlibat	23
3.6. Pola Aliansi (Militer dan Polisi dengan politisi atau pebisnis lokal dan nasional)	25
3.7. Pola Rivalitas (antara militer dan polisi atau antar kelompok-kelompok dalam Militer dan Polisi)	26
BAB IV. DAMPAK BISNIS INDUSTRI MINYAK TERHADAP MASYARAKAT	27
4.1. Community Development oleh Devon dan PetroChina di Desa Rahayu	27
4.2. Konflik Horizontal di masyarakat Rahayu	30
4.3. Konflik yang timbul di Banyu Urip dan Jambaran	30
4.4. Community Development oleh MCL di Banyu Urip dan jambaran	32
4.5. Dampak Lingkungan di sekitar lokasi ladang minyak PetroChina	35
4.6. Tata pemerintahan dan Korupsi	36
4.7. Dampak Keterlibatan Militer dalam bisnis eksploitasi minyak Bojonegoro	37
BAB VI KESIMPULAN	39
Lampiran	41
• Surat-surat	
• Data pendukung	
• Peta	

Bab I

Gambaran Umum

1.1. Kondisi Geografis Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro secara administratif adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak \pm 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi $6^{\circ}59'$ sampai dengan $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}25'$ sampai dengan $112^{\circ}09'$ Bujur Timur.¹

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).² Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro 230.706 Ha, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Pembagian wilayah Kabupaten Bojonegoro

No.	PENGUNAAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE
1.	Baku Sawah Resmi (PU)		
	• Sawah Teknis	21.293	9,73
	• Sawah 1/2 Teknis	1.189	9,22
	• Sawah Belum Teknis	-	0,51
2.	Baku Sawah Tidak Resmi (Non PU)		
	• Sawah Teknis	-	
	• Sawah 1/2 Teknis	8.552	3,75
	• Sawah Belum Teknis	2.453	1,07
3.	Sawah Tadah Hujan	43.292	18,77
4.	Tegal/Ladang	30.870	13,45

¹www.bojonegoro.go.id

² ibid.

Sambungan Tabel Pembagian wilayah Kabupaten Bojonegoro

No.	PENGUNAAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE
5.	Pekarangan	24.091	10,45
6.	Tanah Hutan	94.798	41,14
7.	Danau/Waduk	547	0,24
8.	Tanah Kritis	1.388	0,61
9.	Lain-lain	1.937	0,84
	JUMLAH	230.706	99,84

Sumber: www.bojonegoro.go.id**Luas Kabupaten Bojonegoro dalam tiap kecamatan**

NO.	KECAMATAN	LUAS (km ²)	PENDUDUK	
			JUMLAH	KEPADATAN
1.	Balen	60,52	59.540	984
2.	Baureno	66,37	71.124	1.072
3.	Bojonegoro	25,71	75.346	2.931
4.	Bubulan	84,73	13.970	165
5.	Dander	118,36	70.353	594
6.	Gondang	107,01	22.929	214
7.	Kalitidu	83,01	57.364	691
8.	Kanor	59,78	53.523	895
9.	Kapas	46,38	44.764	965
10.	Kasiman	51,80	27.276	527
11.	Kedewan	56,51	10.606	188
12.	Kedungadem	145,15	75.880	523
13.	Kepohbaru	79,64	60.339	758
14.	Malo	65,41	28.419	434
15.	Margomulyo	139,68	20.628	148
16.	Ngambon	48,65	10.845	223
17.	Ngasem	180,20	68.312	379
18.	Ngraho	71,48	40.267	563
19.	Padangan	42,00	39.169	933
20.	Purwosari	62,32	26.808	430
21.	Sekar	130,24	24.714	190
22.	Sugihwaras	87,15	42.438	487
23.	Sukosewu	47,48	38.022	801
24.	Sumberrejo	76,58	65.458	855
25.	Tambakrejo	209,52	49.828	238
26.	Temayang	124,67	33.106	266
27.	Trucuk	36,71	34.373	936
	TOTAL	2.307,06	1.165.401	505

Sumber: www.bojonegoro.go.id

1.2. Sejarah Singkat Kabupaten Bojonegoro³

Masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad I yang membedakan warna kehidupan sejarah Indonesia jaman Madya dan jaman Baru. Sedangkan Bojonegoro masih dalam wilayah kekuasaan Majapahit, sampai abad XVI ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, kekuasaan pindah ke Demak, Jawa Tengah. Bojonegoro menjadi wilayah kerajaan Demak, sehingga sejarah Bojonegoro kuno yang bercorak Hindu dengan fakta yang berupa penemuan-penemuan banyak benda peninggalan sejarah asal jaman kuno di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Slogan yang tertanam dalam tradisi masyarakat sejak masa Majapahit “*sepi ing pamrih, rame ing gawe*” tetap dimiliki sampai sekarang.

Bojonegoro sebagai wilayah kerajaan Demak mempunyai loyalitas tinggi terhadap raja dan kerajaan. Kemudian sehubungan dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam tanpa disertai gejolak.

Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintoro, diresmikan sebagai raja I awal abad XVI dan sejak itu Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tingkir Adipati Pajang pada tahun 1568. Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Maka Senopati memboyong semua benda pusaka kraton Pajang ke Mataram, sehingga Bojonegoro kembali bergeser menjadi wilayah kerajaan Mataram.

Daerah Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram. Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Toemapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. Tahun itu juga Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria Mentahun I memindahkan pusat pemerintahan kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi. Lokasi Rajekwesi ± 10 Km di selatan kota Bojonegoro.

³ Ibid.

1.3. Metode

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam Workshop Modul Penelitian Keterlibatan Militer dalam Bisnis yang telah dilakukan sebelum penelitian lapangan, metode Penelitian ini menggunakan pendekatan **Kontekstualisasi Progressif** dan **Etnografi Praktis**.

Metode kontekstual progresif melihat kondisi dari ;

- a. tindakan aktor
- b. jejaring aktor tertentu di lokasi
- c. konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh tindakan aktor dan jejaring aktor

Sedangkan pendekatan Etnografi Praktis melihat fenomena di masyarakat melalui ;

- a. Sejarah
- b. Profil Sosial penduduk setempat (etnis, agama, jenis kelamin, dll)
- c. Mata Pencaharian
- d. Organisasi Sosial (pengelompokan-pengelompokan sosial)

A. Teknik penelitian

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dalam metode ini adalah

1. Wawancara
2. Pengamatan
3. Pencatatan Lapangan
4. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
5. Visualisasi (Sketsa, peta, foto, film)
6. Penelusuran Data Sekunder

Untuk mendapatkan data secara praksis di lapangan, dibuat 2 pertanyaan dasar yang masing-masing memiliki turunan pertanyaan. yaitu ;

1. Bagaimana sejarah dan pola tindakan bisnis militer dan polisi di lokasi penelitian.
2. Apa konsekuensi tindakan bisnis tersebut terhadap Kondisi HAM di lokasi penelitian

B. Pencatatan Data Lapangan

Dalam pencatatan data di lapangan minimal ada beberapa bentuk catatan:

- a. Laporan ringkas.
- b. Laporan yang diperluas.
- c. Jurnal penelitian lapangan.
- d. Diskusi tim peneliti.

C. Waktu dan ruang lingkup wilayah penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada bulan Februari dan Maret 2004. pencarian datanya dilakukan dengan melihat sejarah keberadaan pengeboran minyak di wilayah penelitian. Kilas balik ini dilakukan untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi pada saat ini memiliki hubungan sebab-akibat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, agar dapat melihat peristiwa secara komprehensif dan holistik, sehingga dari penelitian ini dilihat kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang.

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah daerah Kabupaten Bojonegoro beserta wilayah sekelilingnya yang berkaitan dengan lokasi industri pengeboran minyak.

Bab II

Sejarah Industri Minyak di Bojonegoro

2.1. Ladang Minyak dan Perusahaan Minyak di Bojonegoro.

Keberadaan ladang minyak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berawal dari ditemukannya sumur minyak oleh Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda pada tahun 1893 di Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro yang berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah. Pada tahun yang sama, Adrian membangun kilang minyak di Cepu, daerah Ledok itu berada. Untuk memperkuat kilang minyaknya tersebut, Adrian Stoop mendirikan perusahaan bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM) yang namanya diambil dari desa tempat kelahirannya. DPM adalah perusahaan asing pertama di Indonesia yang mengelola minyak dan sekaligus sebagai titik awal pertambangan minyak di tanah Jawa.⁴

Seiring perjalanan sejarah, DPM berubah menjadi *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Dan setelah kemerdekaan Indonesia, BPM berubah lagi menjadi PTMRI, Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas, dan terakhir menjadi Pusat pendidikan dan latihan Minyak Bumi dan Gas (Pusdiklat Migas).⁵ Saat ini Pusdiklat Migas telah berubah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tentang minyak di Indonesia, yaitu Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS). Perubahan drastis dari tambang migas yang pertama kali menghasilkan minyak di pulau Jawa menjadi AKAMIGAS dikarenakan menipisnya cadangan-cadangan minyak diladang minyak Cepu. Dengan menipisnya ladang minyak tersebut, mengakibatkan ongkos produksi lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, alat-alat berat yang dulu dipakai untuk eksploitasi minyak saat ini hanya digunakan sebagai alat peraga pendidikan di AKAMIGAS.⁶

⁴ *Mobil Tandai Babak Baru Kota Cepu* Suara Merdeka, Kamis, 19 Januari 2002

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

Pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) seluas 973 km² yang semula dikelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III lapangan Cepu. Wilayah tersebut terletak di 4 kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro dan Tuban. Dua kabupaten terakhir berada di Jawa Timur. Melalui penyerahan WKP ini, sejumlah lapangan minyak, yaitu Kawengan, Lapangan Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dan Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke tangan Pertamina UEP III. Kebijakan pemerintah tersebut bersumber pada Undang – Undang No. 44 tahun 1960 jo UU No. 8 tahun 1971. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa kuasa pertambangan minyak dan gas di Indonesia diberikan kepada Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas. Pertamina UEP III Cepu sendiri mengebor ladang minyak pertama kali pada tahun 1989 di Desa Jepon Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah⁷.

2.2. Santa Fee, Devon dan PetroChina di Bojonegoro

Masuknya Santa Fee Energy Resources (SFER) ke Tuban dan Bojonegoro berawal dari kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk Job Operating Body (JOB) Pertamina – Santa Fe untuk mengelola ladang minyak di Desa Rahayu Kec. Soko Tuban. Awal masuknya proyek ini di desa Rahayu pada tahun 1993 ditandai dengan pembebasan tanah. hasil pengamatan di lokasi mendapatkan data bahwa pada saat itu tanah warga dihargai Rp. 2.600/m².⁸ proses seismik yang dilakukan untuk mengetahui titik sumur dan jumlah kandungan minyak dilakukan pada tahun 1994 hingga 1996. dan pada 1997, SFER sudah melakukan proses eksploitasi dan produksi. pada awal produksinya, SFER mengestimasi mampu menghasilkan 3000 barrel/hari. Dan selanjutnya pada tahun 1998 akan mampu memproduksi 20.000 barrel/hari.

Selain wilayah Tuban, SFER juga sudah memproduksi migas di wilayah Kepala Burung, Irian Jaya (tahun 1973) dan wilayah Tanjung Jabung (tahun 1997).⁹ Pada tahun 2000, kepemilikan hak eksploitasi SFER berpindah ke Devon Energy, perusahaan Amerika Serikat juga yang berpusat di Houston. Setelah di tangan Devon Energy, Devon Energy juga mengembangkan produksinya dengan menemukan sumur minyak baru di wilayah Bojonegoro tepatnya di desa Ngampel kecamatan Kapas. Namun Devon belum memproduksi minyak di wilayah Ngampel.

Selain di Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, Devon Energy juga mengelola enam blok di Sumatra (Jambi) dan Papua. Di Jambi, tepatnya di wilayah pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lapangan minyak Devon itu memiliki potensi jutaan barrel minyak,

⁷ Ibid

⁸ wawancara Joko (red) warga Desa Rahayu

⁹ www.sfer-indo.com

Di Salawati Papua, setidaknya ada 10 sumur yang sudah berproduksi, namun kapasitasnya hanya sebesar 2.800 barrel per hari (bph). Jika aktivitas produksi berjalan normal maka ke sepuluh sumur tersebut mampu memproduksi sebanyak 11.000 bph.¹⁰

Pada akhir 2001, Devon sudah berencana menjual seluruh ladang minyaknya di Indonesia. Dan pada tanggal 15 April 2002, perusahaan minyak Cina, PetroChina mengakuisisi seluruh lapangan minyak milik Devon Energy senilai US\$ 262 juta.¹¹

Lokasi hak pengelolaan eksplorasi PetroChina terletak di 2 lokasi yaitu, Desa Rahayu Kec. Soko Tuban dan Desa Ngampel Kec. Kapas Kabupaten Tuban. Untuk lokasi di Desa Ngampel, proses *seismik* sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini semua instalasi pengeboran sudah terpasang, tapi proses produksi belum dilakukan.

Produksi PetroChina di Desa Rahayu saat ini kurang lebih 8.000 barrel/hari (bph). Menurut salah satu sumber yang kami wawancara, jumlah segitu secara ekonomis tidak layak untuk produksi perhari, karena biaya operasional yang tinggi. Namun demikian bukan berarti bahwa kandungan yang ada di sumur Rahayu tersebut sudah mulai habis, melainkan dibutuhkannya eksplorasi lanjutan untuk mencari celah letak kantong-kantong minyak. Hal ini dilakukan karena pergerakan lapisan bebatuan bumi mengalami pergeseran, sehingga menyebabkan kantong minyak yang sebelumnya berada di suatu tempat berpindah ke tempat lain. Kemungkinan kerugian akan menimpa PetroChina terbantahkan dengan adanya kabar bahwa PetroChina akan menggandeng Petronas Malaysia untuk memperbesar kuantitas produksi.¹²

2.3. PT. Humpus Patragas dan Mobil Cepu Ltd.

Pengelolaan blok Cepu pada awalnya dilakukan oleh PT. Humpuss Patragas, milik Tomy Soeharto, dengan penandatanganan *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina, sebagai satu-satunya BUMN yang memiliki hak pengelolaan migas di Indonesia dengan Humpuss Patragas pada April 1990. kontrak ini berlangsung selama 20 tahun, dari tahun 1990 hingga tahun 2010. Blok Cepu ini luasnya 1.670 km² dan terdiri dari 4 wilayah yaitu Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua. Keempat lokasi sumur ini berada di 2 Propinsi yaitu Cepu, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Sampai 1998 tak kurang dari 15 sumur sudah dibor perusahaan milik Tommy Soeharto ini. Beberapa di antaranya, seperti sumur Nglobo Utara -1 dan Alas Dara -1, sudah menghasilkan minyak mentah¹³.

¹⁰ www.MinergyNews.com

¹¹ ibid.

¹² Wawancara dengan Pak Budi (red), praktisi migas lulusan Universitas terkenal di Indonesia dan Perminyakan Perancis, 17 Februari 2004

¹³ "Ambisi Hebat sang Kuda Laut", Kontan, Edisi I/VI tanggal 1 Oktober 2001.

Sebelumnya di tahun 1997, Humpuss Patragas melakukan pembebasan tanah besar-besaran untuk lokasi awal di Desa Mojodelik dan Desa Gayam, desa yang menjadi titik sentral sumur Banyu Urip dan Jambaran ¹⁴.

Humpuss melepas sahamnya sebesar 49 % kepada Ampolex Cepu Ltd, perusahaan Australia, pada bulan Mei 1996. Tidak lama setelah hampir sebagian saham Humpuss dilepas ke Ampolex, pada Desember 1996 Mobil Oil membeli Ampolex. Dan pada pertengahan 1997, Mobil Oil mengambil alih saham-saham Ampolex Cepu Ltd seluruhnya.¹⁵

Pada Desember 1999, Exxon Corporation merger dengan Mobil Oil dan menjadi ExxonMobil Oil yang kantor pusatnya berada di Irving, Texas Amerika Serikat. Jadilah pada saat itu ExxonMobil Oil sebuah perusahaan minyak raksasa. Pada saat yang bersamaan, Mobil Oil sedang dalam proses mengambil alih saham Humpuss Patragas yang tersisa pada TAC Cepu.

Pada 29 juni 2000, Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan yang dibentuk ExxonMobil Oil untuk menjadi operator lapangan di blok Cepu, mengambil alih pengoperasian dan 51 % sisa saham TAC Cepu dari Humpuss Patragas. Mulai saat itu, ExxonMobil Oil memiliki 100 % TAC blok Cepu.

Tidak lama setelah pengakuisisian saham tersebut, pada tahun 2000 juga Exxon melakukan eksplorasi seismik di wilayah block Cepu. Proses seismik adalah proses untuk mengetahui/memetakan titik sumur pengeboran dan produksi dan jumlah minyak yang terkandung di wilayah tertentu yang telah diketahui memiliki kandungan minyak mentah.¹⁶

Pada bulan April 2001, Exxon mengumumkan hasil penemuannya bahwa pada 2 sumur Banyu Urip #1 dan #3 terdapat kandungan minyak mentah sebesar 250 juta barrel¹⁷. Bahkan menurut data lain disebutkan bahwa kandungan minyak di wilayah tersebut tidak hanya 250 juta barrel, tapi samapi angka 700 juta barrel hingga 1 milyar barrel.¹⁸

Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS), sebuah lembaga studi yang menjadi bagian dari AKAMIGAS mengatakann bahwa Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua menyimpan kandungan minyak mentah sampai 1,4 miliar barrel. Selain minyak mentah, blok Cepu juga memiliki kandungan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik. Dari hasil studi Lemigas ini, pengelola ladang minyak Cepu dapat mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 % atau setara dengan 458,7 juta barrel. Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 %.¹⁹

¹⁴ Wawancara Darto (red), perwakilan warga dalam pembebasan tanah.

¹⁵ Pertamina diminta tidak tergesa-gesa. Bisnis, 25 Agustus 2002.

¹⁶ Wawancara aparat Kodim, sastro (red) yang saat proses seismic menjadi pengaman, 24 Februari 2004.

¹⁷ Company Profil ExxonMobil Oil Indonesia Inc.

¹⁸ Pertamina diminta tidak tergesa-gesa. Bisnis, 25 Agustus 2002.

¹⁹ Ibid.

Setelah mengetahui kandungan yang ada di Blok Cepu tersebut, Pada Januari 2002, Exxon mengajukan perpanjangan kontrak TACnya kepada Pertamina sampai tahun 2030. harus diketahui sebelumnya, bahwa hak kontrak yang telah dibeli Exxon dari Humpuss pada tahun 2000 akan habis pada 2010.

Hingga saat ini, negosiasi perpanjangan kontrak ExxonMobil Oil – Pertamina hingga tahun 2030 masih berlarut larut. Para elit negara pengambil kebijakan berselisih pendapat mengenai pengelolaan ladang minyak Blok Cepu yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar ini.

Bila dibuat kronologi, proses negosiasi perpanjangan kontrak ini adalah:²⁰

- **2001**

Exxon mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan ladang minyak Cepu yang akan berakhir pada tahun 2010 selama 20 tahun hingga 2030.

- **Juli 2002**

Dewan Komisaris pemerintan untuk Pertamina (DKPP) yang dipimpin menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyetujui perpanjangan kontrak Cepu. Namun Kwik Kian Gie, salah satu anggota DKPP menyatakan penolakan perpanjangan kontrak dengan dengan Exxon Mobil Oil. Kwik meminta Pertamina mengelola Cepu.

- **November 2002**

Pertamina menyatakan tidak akan menggunakan kontrak bantuan Teknis (TAC) untuk mengelola Cepu.

- **April 2003**

Pertamina dan ExxonMobil Oil mulai melakukan negosiasi berkaitan dengan permintaan perpanjangan kontrak. Pertamina meminta ExxonMobil memberikan dana bonus sebesar US\$ 400 juta dalam bentuk kas jika ingin memperpanjang kontrak.

- **Juni 2003**

Exxon Mobil mengirim surat kepada Presiden Megawati dengan mengatakan Pertamina mempersulit negosiasi.

- **September 2003**

Pertamina meminta dilakukan uji tuntas atas investasi yang dilakukan Exxon Mobil sebesar US\$ 495 juta dan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2002 US\$ 75 juta. Hasil audit BPKP atas biaya investasi Exxon Mobil hanya US\$ 142 juta yang bisa

²⁰ Koran Tempo, Selasa, 23 Maret 2004.

dipertanggungjawabkan. Selebihnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedua perusahaan kembali melakukan negosiasi mengenai besaran investasi yang telah dikeluarkan.

- **Maret 2004**

Pertamina menyatakan negosiasi dengan ExxonMobil selesai dan akan menggunakan Kontrak Kerja Sama (KKS) Khusus. Penandatanganan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari komisaris, pemegang saham, dan pemerintah.

Kesepakatan yang dicapai, ExxonMobil akan mendapatkan bagian 50 persen dari bagian Pertamina sebesar 40 persen dalam pola bagi hasil dengan pemerintah. Hingga saat ini pemerintah belum memberikan persetujuan atas hasil negosiasi tersebut.

Bab III

Dinamika Peran Militer dan Polisi Dalam Bisnis Industri Minyak di Bojonegoro

3.1. Struktur Militer dan Kepolisian di Bojonegoro²¹

Kepolisian Wilayah Bojonegoro berada dibawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polwil Bojonegoro membawahi 5 Polres :

1. Polres Bojonegoro, membawahi 27 polsek yang tersebar di tiap kecamatan.
2. Polres Tuban
3. Polres Lamongan
4. Polres Gresik
5. Polres Ngawi

Di Bojonegoro terdapat 1 Kodim yaitu Kodim 0813 bojonegoro yang secara struktural berada di bawah komando Kodam V Brawijaya. Kodim 0813 Bojonegoro membawahi 27 Koramil yang berada di tiap kecamatan di Bojonegoro.

3.2. Pembagian Keterlibatan Militer dan Polisi Dalam Bisnis di Bojonegoro

Pembagian keterlibatan militer dalam bisnis yang nampak jelas di Bojonegoro terbagi dalam bentuk institusional, non institusional dan illegal. Bebeapa contoh bentuk bisnis tersebut yang terlihat jelas di Bojonegoro antara lain:

1. **Bisnis jasa transportasi yang institusional.**

Dalam bisnis sektor transportasi ini, militer mempunyai beberapa armada transportasi truck yang digunakan untuk mengangkut material bangunan dan kayu jati. Bisnis ini di bawah kendali Kodam V Brawijaya, melalui Yayasan Bhirawa Anoraga dengan armada transportasi yang diberi nama “Gajah Oling”. Dalam prakteknya, para pengguna armada truck ini disinyalir mendapatkan fasilitas bebas dari retribusi jembatan timbang dan portal. Truck ini juga disinyalir sering digunakan “*blandong*” (pencuri kayu) untuk mengangkut kayu-kayu jati illegal dari hutan.²²

²¹ Sumber dari LSM Lestari (red), 05 Maret 2004.

2. Bisnis pengamanan sarang burung walet yang non institusional

Pada sector bisnis ini, militer mengkoordinir para pengusaha sarang burung walet untuk menggunakan jasa keamanan militer melalui PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkatan Darat). Bagi pengusaha-pengusaha yang telah menggunakan jasa pengamanan oleh militer, untuk meyakinkan para pengusaha sarang burung, maka gudang-gudang sarang burung, pada temboknya diberi tulisan "PRIMKOPAD". Menurut pernyataan salah seorang anggota DPRD, para pengusaha sarang burung walet merasa dirugikan dengan pola semacam ini. Sebab, di samping mereka harus membayar jasa pengamanan untuk militer, mereka juga masih harus menanggung pajak usaha sarang burung kepada pemkab Bojonegoro. Masih menurut anggota DPRD tersebut, Dalam hal ini PRIMKOPAD tidak mempunyai kewenangan untuk menagih jasa pengamanan kepada pengusaha burung walet. Para pengusaha burung walet mengungkapkan kepada anggota DPRD tersebut, *mereka mau menambah sedikit tarif pajak usaha burung walet asal pajak jasa pengamanan PRIMKOPAD dihentikan. Karena kalau membayar pajak ke pemerintah, maka uangnya akan masuk ke negara dan disalurkan ke rakyat. kalau bayar pajak pengamanan ke PRIMKOPAD, uangnya tidak tahu kemana dan pasti tidak akan disalurkan ke rakyat.*²³

3.3. Keterlibatan Militer dan Polisi di perusahaan minyak Bojonegoro yang illegal.

A. Keterlibatan polisi dan militer

Dalam perusahaan minyak di Bojonegoro dan Tuban dibagi dalam 2 perusahaan yaitu *Joint Operating Body*²⁴ (JOB) Pertamina-PetroChina East Java yang sumur minyaknya ada di 2 lokasi ; di Desa Rahayu Kec. Soko Kab, Tuban Desa Ngampel kec. Kapas kab. Bojonegoro dan Pertamina-Mobil Cepu Ltd yang lokasi sumur minyaknya di Banyu Urip Kab. Bojonegoro.

- a. *JOB Pertamina-PetroChina East Java.* Keterlibatan militer dan polisi berawal pada peristiwa penembakan dengan peluru karet oleh aparat pada saat warga sekitar lokasi eksploitasi minyak dan beberapa LSM melakukan demonstrasi di pintu masuk perusahaan pada sore hari setelah magrib tanggal 1 Mei 2002. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut ganti rugi keracunan yang melanda warga Desa Rahayu akibat menghisap gas H₂S (hidrosulfida) yang bocor. Saat itu sumur minyak Rahayu masih dikelola oleh kerjasama Pertamina-Devon Energy. Berhembusnya gas H₂S dari sumur minyak Rahayu sendiri terjadi sejak beberapa minggu sebelum terjadinya insiden penembakan tersebut dan telah banyak menimbulkan korban. Namun demikian, pihak Devon Energy lepas tangan dengan korban yang berjatuh. Akhirnya, warga sekitar lokasi melakukan musyawarah dan memutuskan pada tanggal 1 Mei 2002

²² wawancara LSM lokal Lestari (red), 5 Maret 2004.

²³ Wawancara dengan Anggota DPRD Bojonegoro, 19 Februari 2004.

²⁴ Joint Operating Body adalah bentuk operasi produksi patungan bersama antara perusahaan dalam negeri dengan investor.

untuk demonstrasi dengan memblokir pintu masuk sumur minyak Devon Energy. Insiden penembakan yang dilakukan oleh gabungan Polres Tuban dan Polwil Bojonegoro akhirnya terjadi pada sore hari ketika warga menolak perintah untuk meninggalkan lokasi demonstrasi. Menurut informasi dari korban, saat insiden tersebut, koordinator dari pihak kepolisian adalah Letkol Hariyanto. Sedangkan Kepala Polres Tuban saat itu adalah Ajun Komisaris Besar Oerip Subagio. Insiden tersebut menelan korban penembakan dengan peluru karet berjumlah 5 orang, korban pemukulan 15 orang dan selebihnya kerugian materi.²⁵

Tidak lama setelah insiden tersebut, Devon Energy menjual hak kelolanya kepada PetroChina, perusahaan investor asing China dalam pengeboran minyak. Dan sejak itulah Letkol Inf Djoko Agus S (mantan DANDIM 0813 Bojonegoro Tahun 1999) dan Letkol Mujiana (mantan Kapolres Tuban) diangkat sebagai Manager Security PetroChina.²⁶

- b. *Technical assistance contract (TAC) Pertamina-Mobil Cepu Ltd.* keterlibatan militer dan polisi di perusahaan ini berawal pada saat Humpuss Patragas masih menguasai blok Cepu ini. Awalnya adalah pada saat Humpuss melakukan pembebasan tanah untuk lokasi lapangan pengeboran Banyu Urip pada tahun 1998. institusi militer yang dipakai Humpuss adalah Koramil Kalitidu dengan memaksa warga Desa Mojodelik dan Gayam untuk menyerahkan tanah mereka kepada Humpuss. Intimidasi yang dilakukan Koramil Kalitidu sampai pada mem"PKI"kan warga bila tidak mau menyerahkan tanah mereka.²⁷ Karena di"PKI"kan, masyarakat merasa sangat takut.²⁸ Solusinya adalah menunjuk salah seorang warga, pak Handoyo (red) yang baru saja berhenti kerja di salah satu anak perusahaan Pertamina.²⁹

Pemaksaan untuk menjual tanah berawal ketika masyarakat didatangi oleh Humpuss yang bekerja sama dengan Koramil³⁰. Bahkan menurut penuturan nara sumber, saat itu banyak warga masyarakat dibawa ke Koramil dan ditakut-takuti didakwa PKI dan lain-lainnya. Jumlah masyarakat yang diintimidasi sebanyak 64 orang. Dari 64 orang tersebut, akhirnya terkumpul 20 orang yang dipimpin handoyo dan dibantu Sartono sebagai perwakilan dari 20 orang tersebut. lalu 20 orang tersebut membuat 7 buah surat yang dilampirkan dengan tanda tangan dan KTP dan mengadukan pemaksaan tersebut kepada aparat dan instansi terkait, yaitu Kapolda, Kapolres,

²⁵ Kronologi peristiwa, data korban dan kerugian materiil terlampir

²⁶ wawancara LSM lokal Lestari, 05 Maret 2004

²⁷ Wawancara dengan Handoyo (red), tokoh pemuda yang mengorganisir warga pada saat pembebasan tanah, 26 Februari 2004.

²⁸ Bagi masyarakat setempat, di"PKI"kan seperti mengulang kembali trauma masa lalu. Dalam sejarah, Bojonegoro termasuk salah satu basis PKI. dan saat ini mereka tidak lagi mau mengulang masa lalu mereka, dimana sungai bengawan Solo yang dekat dengan masyarakat telah menjadi cerita turun temurun bagaimana sungai tersebut menjadi sungai darah pada saat pembasmian PKI.

²⁹ ibid

Pertamina Pusat, Pertamina Cepu, Humpuss Pusat, Humpuss Cepu —dan satunya lagi narasumber lupa. Namun ketujuh surat tersebut tidak mendapat tanggapan. Beberapa lama kemudian, akhirnya orang Humpuss bernama Sudarko (red) mendatangi Handoyo dan meminta penyelesaian masalah tanah tersebut secara kekeluargaan. Akhirnya disepakati tiap petak sawah dihargai 1,5 juta. Lokasi tanah tersebut terletak di Desa Mojodelik dan Desa Gayam.³¹

Secara hukum, jual beli tersebut sah. Tapi pembeli tidak bisa mensertifikatkan tanah karena tidak ada tanda tangan ahli waris dan status tanah tersebut masih *Petok D* dan selalu bayar pajak. Akhirnya pada tanggal 15 agustus 2000, pendaftaran hak milik tersebut terealisasi menjadi hak milik tiap orang dan diganti dengan uang keringat tiap orang 1,5 juta dengan syarat membubuhkan tanda tangan. Luas tanah yang dibebaskan adalah 4 hektar dengan jumlah pemilik 64 orang. Pada saat itu, ada 8 orang yang tetap tidak mau menjual tanahnya dan pada beberapa tahun berikutnya sebagian dari 8 orang ini membuat forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip Jambaran (FORKOMASBAJA).³²

Tahun 2000, setelah Humpuss menjual saham dan hak TAC blok Cepu kepada Mobil Cepu Ltd (MCL), perusahaan bentukan ExxonMobil Oil untuk menjadi operator di lapangan, ketelibatan militer juga terlihat dalam pengamanan proses *seismik*.³³ Yang menjadi pengaman saat itu adalah militer dari KODIM 0813 Bojonegoro. Pengamanan ini menjadi pemasukan sampingan anggota KODIM selain gaji yang telah didapatkan dari negara.³⁴

Hasil seismik ExxonMobil Oil mengumumkan bahwa lapangan Banyu Urip mengandung 250 juta barrel. Berdasarkan hasil penemuan ini, ExxonMobil Oil mengajukan perpanjangan kontrak TACnya kepada Pertamina hingga tahun 2030. dampak perpanjangan kontrak ini adalah bahwa lokasi lapangan Banyu Urip memerlukan lahan tambahan untuk proses produksinya. Data yang didapat dari warga menyebutkan bahwa akan ada pembebasan tanah seluas 675 hektar yang meliputi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan kalitidu dan Kecamatan Ngasem dan 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojodelik, Kelurahan Ringin Tunggal, Kelurahan Katul, Kelurahan Gura-gura, kelurahan Tenggor. Kelurahan Begadon, Kelurahan Bonorejo dan Kelurahan Cengklung.³⁵

³⁰ nara sumber Handoyo (red) lupa siapa Danramil Kalitidu saat itu. Yang menjadi petunjuk adalah Danramil tersebut menjabat sebelum Danramil Pak Suli, dan Camat Kalitidu yang menjabat saat itu sebelum Pak Masdukin, mantan Camat Kalitidu.

³¹ ibid

³² ibid

³³ Proses seismik adalah proses yang dilakukan untuk mencari/memetakan sumber berkumpulnya minyak mentah (crued oil) di dalam lapisan bumi dan menentukan titik sumur pengeboran.

³⁴ Wawancara salah satu anggota Kodim Bojonegoro, 24 Februari 2004.

Pembebasan lahan inilah yang saat ini menjadi pembicaraan warga sekitar lokasi dan sekaligus pemicu munculnya tengkulak-tengkulak yang dibekingi militer dan polisi. Selain membekingi spekulasi, keterlibatan militer juga terlihat dengan cara mendirikan perusahaan, terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang tujuannya mendapatkan akses/memperoleh tender yang saat ini sedang ramai di Bojonegoro.

4.4. Bentuk-bentuk keterlibatan.

Bentuk-bentuk keterlibatan militer di Exxon Mobil Saat ini bisa dibagi dalam beberapa pola.

- a. *Dalam Pembebasan tanah.* Proses Pembebasan tanah warga untuk lokasi eksploitasi minyak di sumur Banyu Urip sebenarnya sudah berlangsung sejak masuknya Humpuss patragas ke blok Cepu. Kabar pembebasan tanah saat ini sangat santer di daerah yang akan dibebaskan untuk lokasi Exxon Mobil. Tanah yang akan dibebaskan mencapai 675 hektar. Dan meliputi 2 kecamatan (Kalitidu dan Ngasem) dan 9 kelurahan (Gayam, Mojodelik, Ringin Tunggal, Katul, Tenggor, Gura-gura, Bonorejo, Begadon, Cengklung). Kabar pembebasan tanah juga diperkuat dengan terbitnya SK Bupati No 17 Tahun 2003 Tentang Tim Fasilitas Pengembangan Lokasi Banyu Urip Exxon Mobil–Pertamina. SK ini dibaca oleh publik lebih pada upaya pemerintah menangani pembebasan tanah.³⁶
- b. *Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengakses tender Exxon Mobil.* Pembentukan kelompok-kelompok ini bukan hanya di kalangan elit birokrat dan militer, tapi juga di masyarakat bawah. Dalam klausul yang menjadi bahan pembicaraan dalam Pertemuan Kongres Petroleum Bojonegoro di Hotel Djanggeng,³⁷ dipaparkan bahwa institusi-institusi masyarakat yang bisa mengakses MCL adalah (1). BUMN (2). BUMD (3). Koperasi. Dampaknya adalah saat ini sudah berdiri BUMD dan ramainya ormas-ormas membuat koperasi. Dari 3 bentuk institusi yang bisa mengakses ExxonMobil Oil ini, tidak mengherankan bila kemudian saat ini telah bermunculan organisasi-organisasi masyarakat maupun organisasi berdasarkan kepentingan dari tingkat yang paling kecil sampai yang elit. antara lain :
 - Serikat Pemuda Banyu Urip (SPBU) yang lahir tanggal 23 Maret 2003 dan mengaku tersebar anggotanya di 13 desa³⁸,

³⁵ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), tokoh pemuda yang mengorganisir warga pada saat pembebasan tanah.

³⁶ wawancara ketua LSM local Lestari (nama LSM bukan sebenarnya)

³⁷ hari Minggu, 22 Februari 2004

- Forum Komunikasi masyarakat Banyu Urip-Jambaran (FORKOMASBAJA) yang dibentuk pada 13 Agustus 2002³⁹,
 - Seputar Masyarakat Jambaran (SEMAR) yang dibentuk oleh 9 lurah yang wilayahnya akan menjadi lokasi ExxonMobil Oil. Kesembilan lurah tersebut adalah : (i) Lurah Cengklung, (ii). Lurah Gayam, (iii). Lurah Mojodelik, (iv). Ringin Tunggal, (v). Katul, (vi). Lurah Tenggong, (vii). Lurah Gura-gura, (viii). Lurah Bonorejo dan (ix). Lurah Begadon.⁴⁰
 - Kongres Petroleum Bojonegoro yang anggotanya terdiri dari ormas-ormas, koperasi-koperasi dan tokoh masyarakat.⁴¹
 - Guyub Bojonegoro yang beranggotakan putra-putra Bojonegoro yang kebanyakan berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan anggotanya banyak dari Militer dan Polisi.⁴²
- c. *Pengamanan*. Keterlibatan militer maupun polisi dalam pengamanan saat ini adalah porsi yang paling kecil keterlibatannya. Minimnya keterlibatan polisi maupun militer bukan berarti bahwa polisi ataupun militer tidak lagi menjadi pengaman, tapi dikarenakan MCL belum melakukan produksi. Hal ini terbukti walaupun MCL belum melakukan proses produksi, tapi hasil wawancara dengan salah satu security MCL memperlihatkan bahwa terjadi persaingan yang sangat ketat antar institusi maupun kelompok untuk memasukkan orang mereka ke dalam tubuh Security MCL. Saat ini jumlah Security MCL sebanyak 162 orang. Di bawah ini adalah hasil wawancara bagaimana proses perekrutan menjadi Security MCL⁴³

C. Aktor-aktor yang terlibat

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam Exxon tidak murni oleh militer saja, tapi terbentuk dan dikelompokkan oleh kepentingan-kepentingan individual antara sipil, polisi dan militer. Aktor yang terlibat antara lain;

- a. ***PT. Indonadi Perdana***. PT ini beralamat di Jakarta dengan pemodal utama Ibu Kartika Dewi Soekarno. pelindung PT ini adalah Pak Kolonel Soegono dan Letjend Rono Wijoyo yang menurut narasumber keduanya orang LEMHANAS. Handoyo (nama samaran) adalah salah satu warga Gayam yang saat ini menjadi penggerak lapangan untuk menjadi perantara/tengkulak pembebasan tanah ini. Diketahui Joko Agus,

³⁸ Wawancara Mbak Sari (red) ketua SPBU

³⁹ profil FORKOMASBAJA terlampir.

⁴⁰ Wawancara LSM local Lestari (red)

⁴¹ wawancara Pak Saiful. (red), 20 Februari 2004

⁴² ibid

⁴³ Daftar nama security Mobil Cepu Ltd terlampir.

Proses Perekrutan Karyawan Security Mobil Cepu Ltd.

No.		Cara masuk	Nama karyawan Security MCL	Keterangan
1.	Militer	Rekomendasi anggota militer Parmanu (anggota Polisi Militer)	Teguh Imam	
		Rekomendasi intel KODIM, Alex	Agus Samandi	Alex sampai saat ini masih sering berkomunikasi dengan <i>Manager Security MCL</i>
2.		Rekomendasi/dibawa oleh Koramil Padangan	Ujang Gristiantoro	
		Masuk melalui polisi secara personal, karena masih keluarga polisi	Edi Supriyoso	
			Gunaryo	
			Dianto Mugiarto	
			Ugik Nuryono	
	Johan Rofiq			
	Polisi	Rekomendasi/dibawa oleh mantan Kapolres Endang Sofyan periode 2000	Mustain	
			Samuri	
			Nurjana	
			Gunari	
Kariman				
		Dasar	Sebelumnya adalah anggota Kamra yang mendapat jatah dari Polres	
3	Melalui lurah/camat/bupati		Harus membayar biaya sekitar 15-20 juta	
4	Melalui karyawan MCL sendiri			

Diolah dari hasil wawancara dengan Anggota Security MCL.

Manager security PetroChina Oil/mantan Dandim Bojonegoro, turut membantu kerja-kerja Handoyo di lapangan. Kebetulan, Istri Joko Agus dan Handoyo juga sering bertemu, karena keduanya menjadi Caleg Partai Demokrat untuk Pemilu 2004. Istri Joko Agus Caleg urutan ketiga sedangkan Handoyo urutan kelima. Selain Joko Agus, Handoyo juga diberi jaminan oleh Pak Kolonel Soegono dan Letjend Rono Wijoyo, sebagai Pelindung PT, bahwa DANDIM Bojonegoro juga akan menjadi pelindung Handoyo di Bojonegoro.⁴⁴

Menurut nara sumber, nama PT Indonadi Perdana yang digunakan untuk proyek pembebasan tanah ini telah diganti, tapi struktur para pihak yang ada dalam perusahaan tersebut tetap.

- b. *Guyub Bojonegoro***, adalah semacam paguyuban yang didirikan oleh putra-putra Bojonegoro yang dinilai sukses dalam karirnya. Sebagian besar anggota paguyuban ini adalah pejabat militer dan mantan pejabat militer dan polisi yang lebih banyak berkantor di Jakarta. Saat ini Pak Muhantoyo, mantan polisi yang terakhir bertugas di Mabes POLRI Jakarta, masih menjadi ketua Guyub Bojonegoro untuk periode yang kedua kalinya. Aktifitas yang dilakukan Guyub Bojonegoro sendiri bersifat sosial kemasyarakatan. Tapi menurut narasumber, kerja-kerja yang dilakukan Guyub Bojonegoro lebih pada bisnis atau makelar⁴⁵ proyek-proyek pemerintahan yang ada di Bojonegoro. Dalam konteks ExxonMobil, keterlibatan guyub belum terlihat nyata. Namun, pertemuan – pertemuan para anggota guyub dengan dengan pihak pemerintah, Bupati Santoso maupun anggota dewan sering diadakan baik di Jakarta maupun di Bojonegoro⁴⁶.

Keterlibatan jenderal-jenderal militer dan polisi dari Jakarta juga diungkapkan oleh Danramil Kalitidu. Kegelisahan Danramil ini diungkapkan dengan nada mengumpat bahwa “ tidak ada itu bisnis militer di daerah sini, yang ada adalah jenderal-jenderal Jakarta yang selalu mendatangi daerah sini, coba kamu ungkap itu jenderal-jenderal Jakarta. Saya juga sudah cape direpoti mereka”.⁴⁷

- c. *Di daerah Gayam***, disinyalir kelompok di bawah Prabowo juga sedang beroperasi. Terakhir diketahui bahwa Prabowo juga mendirikan perusahaan bernama PT Prabowo Jaya Sakti (PT PJS). Penggerak utama PT PJS adalah Tamam Syaefuddin, seorang sipil yang aktif di Partai Golkar Bojonegoro dan menjabat sebagai bendahara partai.⁴⁸
- d. *Menurut penuturan Danramil Kalitidu***, Letkol Setyo Hartoyo, Asisten Teritorial Kodam IV Siliwangi juga pernah mendatanginya di Koramil Kalitidu. Ketika Danramil ditanya mengenai aktivitas spesifik yang telah dilakukan orang tersebut, Danramil Kalitidu ini tidak mengetahui persis. Beliau hanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah menantu Lurah Sumengko⁴⁹.

⁴⁴ Wawancara Handoyo

⁴⁵ Wawancara pak Saiful (nama samaran).

⁴⁶ Wawancara Anggota DPRD Bojonegoro.

⁴⁷ Diungkapkan oleh Danramil Kalitidu saat wawancara

⁴⁸ wawancara LSM local Lestari

3.6. Pola Aliansi (Militer dan Polisi dengan politisi atau pebisnis lokal dan nasional)

- a. Bupati dengan BUMD.** pada tahap pencalonan menjadi bupati, Pujiono, salah seorang warga sipil pengusaha kaya di Bojonegoro, memback-up kebutuhan dana Santoso (mantan anggota Kostrad dengan pangkat terakhir Kolonel). Saat ini baru terbentuk BUMD PT Asri Dharma Sejahtera di Bojonegoro. sebagai kompensasi bantuan saat memback-up kebutuhan Santoso menjadi bupati, Pujiono dijadikan direktur PT Asri Dharma Sejahtera. Salah satu lokasi yang telah dibebaskan Pujiono berada di daerah Sumengko seluas 600 m³ yang kelak akan dijadikan bengkelnya kendaraan ExxonMobil.⁵⁰
- b. Pada pembebasan tanah** yang sedang ramai-ramainya ini, PT Indonadi Perdana beraliansi dengan Bupati Santoso. Menurut Handoyo (red) yang telah beberapa kali bertemu dengan Santoso, dia juga menginisiasikan pertemuan Bupati Santoso dengan pihak PT Indonadi. Bupati Santoso meyakinkan PT ini, bahwa PT ini menjadi prioritas utama bila pembebasan tanah dilakukan. Handoyo mengklaim sudah memegang tanah seluas 182 Ha dari 675 Ha yang akan dibebaskan untuk eksplorasinya ExxonMobil. Sisanya sedang digarap bersama dengan anak buahnya. Menurutnya, selain telah berkongsi dengan bupati, dia juga telah berkongsi dengan camat, lurah dan DANDIM. Mengenai DANDIM, yang membukakan pintu/link dengan DANDIM bukannya Handoyo langsung, tapi dilakukan oleh Pak. Kolonel (purn) Soegono dan purn. Letjend Rono Wijoyo, selaku pelindung PT Indonadi. Jatah yang dijanjikan kepada para pihak adalah sebagai berikut : Bupati Rp. 1.000/meter², Camat Rp. 1.000/m², lurah Rp. 1.000/m², Dandim Rp. 1000/m², LSM Rp. 1.000/m². Saat ini, Handoyo belum menemukan LSM mana yang akan diajak bekerja sama.⁵¹
- c. Kelompok Guyub Bojonegoro.** walaupun Guyub saat ini masih belum terlihat geraknya dan sedang mencari celah untuk terlibat. Namun demikian, menurut narasumber, sering terjadi pertemuan-pertemuan antara guyub dengan para elit (bupati, anggota dewan, tokoh masyarakat) baik di Jakarta maupun di Bojonegoro.⁵²
- d. Kongres Pertoleum Bojonegoro** juga sering berkomunikasi dengan Guyub Bojonegoro. selain itu, Kongres Petroleum Bojonegoro juga telah menginisiasikan terbentuknya Forum Badan Perwakilan Desa (FBPD) yang terdiri dari 14 Desa yang berada di wilayah operasi MCL.⁵³

⁴⁹ Wawancara Danramil Kalitidu, 8 Maret 2004

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Wawancara Handoyo (red), 26 Februari 2004

⁵² Wawancara Anggota DPRD Bojonegoro (red), 19 Februari 2004

3.7. Pola Rivalitas (antara militer dan polisi atau antar kelompok-kelompok dalam Militer dan Polisi)

Rivalitas yang terjadi antara polisi dengan militer sebenarnya cukup terlihat kalangan elit dan kalangan *grassroot* :

- a. **Saat ini Bupati Mochamad Santoso dan Wakil Bupati. HM. Thalbah**, sedang konflik kepentingan dan berjalan dengan kelompoknya masing-masing. Wakil bupati merasa bahwa dalam mengurus MCL yang sebentar lagi akan beroperasi, Bupati Santoso lebih banyak bekerja sendiri dengan orang-orangnya. Konflik ini juga dipicu latar belakang politik. Santoso yang berasal dari militer (Kostrad) dan naik menjadi bupati memakai baju politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁵⁴ Thalbah menjadi wakil bupati melalui dukungan dari Partai Golkar. Selain itu Bupati juga telah bertemu dengan pihak PT Indonadi Perdana (sekarang bukan lagi PT. Indonadi Perdana tapi sudah berubah dengan PT lain, tapi struktur di dalam PT tersebut orangnya sama) yang dilindungi oleh Kolonel Soegono dan Letjend Rono Wijoyo.⁵⁵
- b. **Secara institusional, terjadi juga rivalitas antara kepolisian dan militer.** Militer yang dulu sering mendapatkan order untuk mengamankan operasi perusahaan minyak di Bojonegoro, saat ini sudah mulai digantikan oleh pihak kepolisian. Menurut sumber yang diwawancarai, walaupun saat ini secara institusi, kepolisian yang sering diminta perusahaan minyak untuk mengamankan, tapi tetap saja militer lah yang mampu mengatasi kerja-kerja pengamanan. Rivalitas juga terjadi di luar bisnis minyak, yaitu kayu jati. Pihak militer menyatakan bahwa polisi di Bojonegoro saat ini menjadi “*blandong berdasi*” (maling berdasi), karena menjadi pelaku dan pelindung dalam pencurian kayu jati di wilayah Bojonegoro dan Tuban.⁵⁶
- c. **Di tataran grassroot**, terjadi pula gesekan antara Parmani yang menjadi Ketua FORKOMASBAJA dan Suparmo yang telah bekerja sama dengan elit lokal dan nasional. Parmani yang sebelum berdirinya FORKOMASBAJA telah mengorganisir warga sekitar untuk bersikap kritis terhadap MCL, berseberangan dengan Suparmo yang menjadi tengkulak pembebasan tanah.

⁵³ wawancara Pak Saiful (red)

⁵⁴ pernyataan anggota DPRD Bojonegoro

⁵⁵ wawancara LSM local, Lestari (red)

⁵⁶ pernyataan anggota Kodim Bojonegoro saat wawancara

Bab IV

Dampak Eksploitasi Minyak dan Keterlibatan Militer terhadap Masyarakat

Dampak hadirnya perusahaan eksploitasi minyak baik di wilayah Desa Rahayu oleh PetroChina maupun di wilayah Mojodelik oleh MCL berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ecosoc), terjadi dalam beberapa bentuk.

4.1. Community Development oleh Devon dan Petrochina di Rahayu

Community Development (CD) di Desa Rahayu disepakati pada tanggal 6 Mei 2002 oleh pihak Devon sebagai Pihak Pertama dan masyarakat Desa Rahayu yang diwakili Kepala Desa Rahayu sebagai Pihak Kedua. Kesepakatan ini diadakan persis setelah terjadinya insiden penembakan oleh aparat kepolisian tanggal 2 Mei 2002 saat masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor Devon mengenai ganti rugi akibat keracunan gas H₂S yang berasal dari Devon.

Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa⁵⁷ ;

1. Pihak Pertama bersedia untuk memberikan bantuan CD sesuai dengan kemampuan perusahaan setiap tahun dan akan berkoordinasi dengan dengan Pihak Kedua untuk pelaksanaannya.
2. Pihak Kedua setuju menyalurkan persoalan yang terkait dengan gas H₂S serta kebisingan kepada instansi pemerintah yang berwenang dan Pihak pertama setuju untuk mengadakan penelitian yang dilakukan oleh pihak independen dengan memperhatikan saran-saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan apapun hasil dari penelitian tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan senantiasa memperhatikan sumber daya manusia yang ada disekitar daerah operasi perusahaan didalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan persyaratan rekrutmen dan peraturan yang berlakuk di perusahaan pihak pertama.

⁵⁷ Nota Kesepakatan Devon dan warga masyarakat. (terlampir)

4. Pihak Kedua sepakat dan bersedia untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tidak dalam bentuk demonstrasi maupun pemaksaan kehendak di masa yang akan datang, akan tetapi akan selalu melalui prinsip musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar daerah operasi perusahaan.

Dalam lampiran kesepakatan tersebut disebutkan, CD yang akan dilakukan Pihak Pertama, Devon adalah :

Pada tahun 2002 Pihak Pertama bersedia berkontribusi ke Desa Rahayu berupa:

1. Pemberian kambing sejumlah 300 ekor yang akan diperuntukan untuk keluarga pra sejahtera sesuai dengan data yang ada di pemerintahan Desa rahayu yang diketahui oleh camat Soko, serta penyalurannya melalui kelompok-kelompok masyarakat dan bukan pada perorangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. memberikan program pompanisasi/irigasi pada petani seluas \pm 40 hektar terutama untuk petani yang mempunyai tanah disekitar *flare* CPA, sehingga dengan diselesaikannya program pompanisasi/irigasi tersebut di masa datang petani akan menanam dengan pola tanam sesuai dengan kesepakatan yaitu: padi-padi-jagung. Dan apabila berdasarkan dari hasil penelitian dari pihak institusi ilmiah yang independen, bahwa masih terjadi kerusakan tanaman yang sesuai dengan pola tanam di atas yang diakibatkan oleh cahaya *flare*, maka perusahaan masih tetap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.
3. Membantu kesehatan masyarakat dengan melakukan klinik keliling berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah kabupaten Tuban.

Pada tahun 2003 Pihak pertama akan :

1. Melakukan program pompanisasi tahap kedua yang mencakup areal pertanian seluas +/- 50 hektar.
2. Membangun pasar sesuai kemampuan perusahaan.
3. Membuat sanitasi sesuai dengan program CD
4. Pemberian kambing sejumlah 106 ekor yang akan diperuntukkan untuk keluarga pra sejahtera sesuai dengan data yang ada di Pemerintahan desa Rahayu yang diketahui oleh Camat Soko, serta penyalurannya melalui kelompok-kelompok masyarakat dan bukan pada perorangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Dari kesepakatan ini terlihat bahwa masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dengan adanya perusahaan, bahwa masyarakat akan mendapatkan kambing ternak dan

⁵⁸ ibid

pompa yang dapat mengairi sawah. Dalam realisasinya di lapangan memang benar bahwa perusahaan memberikan kambing dan juga pompa. Namun jumlah yang dijanjikan pada kesepakatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan masyarakat. hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas CD yang telah disepakati. Hal ini terbukti dari surat tuntutan masyarakat Dukuh Randu Desa Rahayu yang terletak sebelah timur berdekatan langsung dengan lokasi pengeboran Devon Kepada pihak Petrochina yang telah menggantikan Devon sebagai pengelola sumur minyak Rahayu.⁵⁹ Dalam tuntutan tertanggal 25 Februari 2003 tersebut terlampir beberapa komplain, antara lain :

1. Sejak didirikan/adanya eksplorasi pengeboran minyak, limbahnya dibuang ke arah timur atau ke tanah warga Dukuh Gandu.
2. Perusahaan yang selama ini melaksanakan eksplorasi yang telah berganti-ganti tidak mempunyai tempat khusus pembuangan limbah.
3. Semenjak adanya perusahaan, tanah milik warga menjadi tidak produktif.
4. Sejak adanya pengeboran minyak, tanah warga termasuk daerah bahaya sehingga petani tidak bisa leluasa mengolah tanahnya setiap saat.
5. Selama ini warga belum pernah dan tidak pernah mengajukan komplain tetapi perusahaan sama sekali ada perhatian.
6. Dari sisi analisis dampak lingkungan, daerah sebelah timur merupakan daerah yang sangat rawan, tetapi justru yang memperoleh kompensasi adalah tanah sebelah barat, sebelah selatan dan sebelah utara karena warganya aktif menuntut.
7. Untuk warga yang memiliki tanah di sebelah timur, sama sekali tidak pernah mengajukan dan perusahaan semakin tidak tahu diri dan tidak mau tahu.
8. Artinya perusahaan tidak mempunyai itikad baik terhadap lingkungan. Ini terbukti masyarakat yang dirugikan bertahun-tahun dan tidak minta sama sekali diabaikan.

Selain tidak jelasnya CD yang dilakukan PetroChina (sebagai pengganti Devon Energy), salah seorang yang pernah mendampingi masyarakat Desa Rahayu mengatakan bahwa CD yang dilakukan oleh pihak Devon dan Petrochina saat ini hanya “*dagelan*” para elit lokal dan pihak perusahaan sendiri. Masih dengan pernyataan orang tersebut, “*buktinya salah satu birokrat desa yang dulu menjadi menjadi ketua CD sekarang sudah menjadi rekanan perusahaan untuk mensuplay kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab dia untuk mengkritisi CD malah dikesampingkan. Masa*

⁵⁹ surat gugatan terlampir

⁶⁰ Wawancara Ketua LSM lokal, Lestari.

pengurus desa yang gajinya gak seberapa rumahnya sekarang sudah bertingkat, sedangkan tetangga-tetangganya masih tetap seperti dulu. Ini kan jadi konflik sendiri di masyarakat itu”⁶⁰

4.2. Konflik Horizontal di Masyarakat Rahayu

Setelah ditelusuri secara merunut sejak peristiwa penembakan aparat kepolisian saat demonstrasi tuntutan ganti rugi keracunan H₂S, ditemukan bahwa pada awalnya, tepatnya sampai saat demonstrasi tersebut, masyarakat masih bersatu dalam menghadapi keberadaan Devon Energy (juga PetroChina sebagai perusahaan berikutnya). Konflik justru muncul pasca peristiwa penembakan tersebut, yaitu sejak masyarakat disugahi program CD oleh Devon dan PetroChina. Indikasi tersebut dibuktikan dengan beberapa hal diantaranya:

- a. Mengundurkan dirinya Pak Dodi (red) beserta 22 orang jajarannya sebagai ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Saat diwawancarai, Pak Dodi mengungkapkan bahwa dirinya sudah capek dengan masalah yang ada di desa Rahayu ini.⁶¹
- b. Latar belakang tuntutan yang dilakukan warga masyarakat Dukuh Gandu ternyata tidak hanya mengenai dampak lingkungan yang limbah dan menurunnya produksi pertanian, tapi juga karena selama ini masyarakat Dukuh Gandu tidak pernah merasakan dampak positif ekonomis atas keberadaan Devon dan PetroChina. Surat tuntutan yang diajukan masyarakat Dukuh Gandu yang terakhir menunjukkan hal ini.

Pecahnya masyarakat juga disebabkan karena Pak Dasmo, yang selama ini diberi tanggung jawab menjadi ketua dalam program CD tidak transparan dalam menjalankan program tersebut, keluhan dari masyarakat bahwa pemberian kambing dan pompa air yang diberikan Devon dan PetroChina tidak semuanya diberikan kepada masyarakat. selain itu Dasmo secara pribadi juga telah menjadi rekanan *suplayer* kebutuhan PetroChina.⁶²

4.3. Konflik yang timbul di Banyu Urip dan Jambaran.

Konflik sebenarnya telah berlangsung di masyarakat sekitar Banyu Urip dan Jambaran sejak Humpuss Patragas masih menjadi pengelola Blok Cepu pad tahun 1998. saat itu, dari 64 orang yang menjual tanahnya ke Humpuss Patragas, ada 8 orang yang tetap tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijual. Dari 8 orang inilah yang kemudian mendirikan organisasi masyarakat yang dinamakan FORKOMASBAJA.

Pada perkembangannya kemudian, setelah Blok Cepu dikelola oleh Mobil Cepu Ltd (MCL), konflik bertambah melebar dan membesar. Salah satu pemicu terbesar munculnya konflik adalah pengembangan ExxonMobil Oil dalam produksinya hingga tahun 2030 dan

⁶¹ Wawancara pak Dodi (red)

⁶² Wawancara LSM local, Lestari.

membutuhkan pelebaran lahan hingga \pm 675 hektar. Mulai saat inilah muncul tengkulak dan pemodal yang tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi juga oleh pejabat eksekutif, legislatif, badan pertanahan, dan juga militer. Pihak yang dulu memimpin masyarakat dengan menjual tanahnya kepada Humpuss Patragas, turun kembali untuk menjadi perantara/makelar penjualan tanah masyarakat kepada MCL. Pihak ini telah mendapatkan modal dari PT Indonadi Perdana yang di dalamnya terdapat unsur militer sebagai pelindung. Pihak ini telah menyatakan sudah ada 182 hektar tanah warga yang siap dijual. Selain munculnya tengkulak tanah, muncul juga organisasi-organisasi masyarakat lokal yang siap memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. Diantaranya FORKOMASBAJA, SPBU dan SEMAR. Selain di masyarakat sekitar lokasi ExxonMobil, muncul juga organisasi baru dengan skala yang lebih besar maupun organisasi yang sudah lama terbentuk yang mencoba masuk terlibat dalam pengembangan ladang minyak Blok Cepu seperti, Kongres Petroleum Bojonegoro dan Guyub Bojonegoro.

Konflik menjadi lebih besar karena ketidakpastian pemerintah dalam menangani pembebasan tanah ini dan juga bagaimana nanti hak-hak masyarakat tetap disalurkan. Akibatnya adalah tiap-tiap organisasi mencari data sendiri-sendiri dan berinisiatif melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang bisa menyalurkan kepentingan organisasi tersebut. Dampaknya adalah timbulnya prasangka antara satu organisasi dengan organisasi lain. Contoh yang terjadi adalah pada SPBU dan FORKOMABAJA.

Kedua organisasi ini sebenarnya memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. SPBU mengharapakan agar nantinya Mobile Cepu Limited tidak membeli tanah mereka tapi membuat sistem sewa dan bagi hasil, sehingga bila kontrak dengan Mobile Cepu Limited berakhir, mereka dapat mengelola dan memiliki tanah mereka kembali tanpa harus kehilangan status kepemilikan.

Namun kedua Organisasi ini juga sadar bahwa kemungkinan untuk melakukan perjanjian sistem sewa ini kemungkinan tidak berhasil. Menurut kedua organisasi ini, MCL tidak akan mau repot dengan sistem sewa. *“Kalau sewa, tiap tahun harus perbaharui kontrak dan juga masyarakat nanti menuntut kenaikan sewa tanah berdasarkan fluktuasi harga tanah, inilah yang mungkin membuat MCL tidak mau melakukan sistem sewa”* ujar Parsudi, salah satu warga Gayam. Pihak MCL menghendaki ada pihak ketiga yang menangani masalah tanah ini. Sehingga bila terjadi konflik, MCL tidak menanggung resiko konflik tersebut, tapi yang menanggung cukup antara masyarakat dengan pihak ketiga ini⁶³.

Kontra antara SBPU dengan FORKOMASBAJA adalah terletak pada klaim anggota organisasi tersebut. Kedua Organisasi ini mempunyai wilayah anggota organisasi yang sama yaitu di 2 kecamatan, Kalitidu dan Ngasem. Selain itu, terjadi ketidakpercayaan antara keduanya. SPBU menuduh FORKOMASBAJA sebagai antek MCL yang akan mengambil

⁶³ Pernyataan Parsudi, Ketua FORKOMASBAJA saat wawancara.

keuntungan dan tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar lokasi MCL. Konflik keduanya juga diakibatkan banyaknya tengkulak dari unsur eksekutif, birokrat, badan pertanahan dan militer yang mendatangi kedua organisasi warga ini.

Pihak kelurahan sebagai birokat terdekat dengan masyarakat juga tidak mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakatnya. malahan lurah yang wilayahnya terkena pembebasan tanah juga membuat organsasi SEMAR (Seputar Masyarakat Banyu Urip Jambaran) yang beraggotakan 9 Lurah. Menurut pernyataan para lurah tersebut, tujuan pembentukan organisasi ini juga untuk memperjuangkan hak-hak warganya. Walaupun dalam rapat Kongres Petroleum Bojonegoro dilaporkan bahwa sudah ada lurah yang terlibat dalam kerja sama dengan makelar dalam pembebasan tanah, bahkan lurah tersebut telah memiliki mobil truk.⁶⁴ Inisiatif pembentukan organsasi para lurah ini juga tidak bisa disalahkan kepada lurah saja, hal ini terjadi karena tidak adanya informasi yang diberikan Kabupaten/ Bupati sebagai atasan mereka secara struktural. Oleh karena itu, para lurah tersebut menghimpun kekuatan untuk menguatkan posisi desa mereka terhadap datangnya investasi ExxonMobil Oil. Bahkan beberapa waktu lalu, 14 lurah yang diorganisir oleh SEMAR mengancam akan melakukan demonstrasi bila tidak ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten tentang kabar berlanjutnya ExxonMobil Oil di wilayah mereka.⁶⁵

4.4. Community Development oleh MCL di Banyu Urip dan jambaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Mobil Cepu Limited telah banyak melakukan *community development* sebagai pertanggungjawaban perusahaan (*corporate responsibility*) tersebut kepada masyarakat sekitar lokasi. Bila melihat pendataan dan laporan kritis yang telah dilakukan oleh FORKOMASBAJA, didapat bahwa MCL cukup banyak melakukan kegiatan *community development*. Di bawah ini adalah rangkaian CD yang dilakukan di beberapa desa sekitar lokasi banyu Urip dan Jambaran⁶⁶ :

1. Desa Brabowan

- a. Pembangunan pagar Sekolah Dasar negeri Brabowan
- b. Pembangunan MCK di Sekolah Dasar Negeri Brabowan
- c. Pengerasan jalan poros sepanjang 200 m
- d. Pembangunan pagar masjid Al Akrom
- e. Pembangunan lantai musolla
- f. Pemberian Beasiswa untuk beberapa anak Sekolah Dasar Negeri Brabowan.
- g. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin
- h. Pelaksanaan lomba melukis untuk anak-anak TK, SD, MI sewilayah Banyu Urip dan Jambaran
- i. Pemberian bantuan beberapa peralatan ibadah di masjid dan Musolla

⁶⁴ Rapat Kongres Petroleum Bojonegoro, 22 Februari 2004.

⁶⁵ Sumber LSM local, Lestari.

⁶⁶ laporan FORKOMASBAJA terlampir

2. Desa Bonorejo

- a. pembangunan jalan poros sepanjang 1500 m
- b. pembangunan MCK
- c. pembangunan lantai masjid dan musolla
- d. percobaan penanaman kedelai unggul
- e. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- f. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak sekolah dasar negeri Bonorejo
- g. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

3. Desa Mojodelik

- a. pembangunan jalan poros sepanjang 2000 m
- b. pemasiran dan pemagaran lapangan
- c. pembangunan lantai masjid dan musolla
- d. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- e. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak sekolah dasar negeri Mojodelik
- f. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

4. Desa Gayam

- a. pembangunan jalan poros sepanjang 1500 m
- b. pembangunan lantai masjid dan musolla
- c. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- d. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak sekolah dasar negeri Gayam
- e. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin
- f. Pelaksanaan lomba bayi sehat sewilayah sekitar Banyu Urip dan Jambaran

5. Desa Begadon

- a. pembangunan lantai masjid dan musolla
- b. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- c. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak sekolah dasar negeri Begadon
- d. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

6. Desa Ringin Tunggal

- a. pembangunan lantai masjid dan musolla
- b. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- c. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak SDN dan MI
- d. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

7. Desa Katur

- a. pembangunan lantai masjid dan musolla
- b. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- c. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak SDN dan MI
- d. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

8. Desa Sumengko

- a. pembangunan lantai masjid dan musolla
- b. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- c. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak SDN dan MI
- d. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

9. Desa Beged

- a. pembangunan lantai masjid dan musolla
- b. pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musolla
- c. Pemberian beasiswa untuk beberapa anak SDN dan MI
- d. Pemberian bantuan untuk warga fakir miskin

Dalam pelaksanaan *Comunity Development* ini ternyata banyak mengalami penyimpangan dan juga tidak tepat sasaran.⁶⁷ Dalam penilaian hasil pengamatan FORKOMASBAJA disebutkan bahwa ExxonMobil Oil justru menimbulkan masalah baru di masyarakat. ExxonMobil Oil juga dinilai berlebihan dalam melakukan pemberitaan dan iklan-iklan mengenai pemberdayaan masyarakat di Banyu Urip dan Jambaran, Perekrutan tenaga kerja lokal pada proses seimik dan Security dan janjinya akan merekrut tenaga kerja lokal, ternyata tidak berjalan. Malah banyak tenaga kerja orang luar yang dibuatkan KTP lokal oleh oknum karyawan Perusahaan MCL, sebagai perusahaan operator ExxonMobil Oil di lapangan, dan oknum birokrasi. Selain itu, banyak lagi program-program yang lebih bersifat karikatif dan menguntungkan beberapa orang saja⁶⁸.

Di sisi lain tuntutan utama masyarakat Banyu Urip dan Jambaran tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pihak MCL. Setidaknya FORKOMASBAJA sudah 2 kali melakukan demonstrasi menuntut hal mendasar yang mereka inginkan, yaitu;

- a. Demo masyarakat Ngasem dengan memblokir pintu masuk lokasi pengeboran tgl 15 Agustus 2002 dilakukan oleh Forkomasbaja pukul 08.00 – 11.00 WIB. Tuntutannya adalah : (1) penyelesaian ganti rugi lahan yang dipakai MCL seluas 160 hektar, (2) menuntut diberi pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang seleksinya dilakukan secara terbuka dan tanpa rekayasa, (3) Exxon Mobil harus pindah kantornya dari Cepu ke Bojonegoro. “mereka mengeksploitasi minyak di Bojonegoro, tapi mengapa kantornya di Cepu” ujar Parmani sebagai koordinator aksi.⁶⁹
- b. 15 warga dari Forum Komunikasi masyarakat Banyuurip dan Jambaran (FORKOMASBAJA) mendatangi DPRD Bojonegoro. inti dari kedatangan mereka adalah mempertanyakan proses ganti rugi tanah mereka yang dipakai Exxon Mobil.⁷⁰

⁶⁷ hasil pengamatan yang dilakukan oleh FORKOMASBAJA terlampir.

⁶⁸ Lihat lampiran hasil pengamatan FORKOMASBAJA

⁶⁹ Jawa Pos, 16 Agustus 2002

4.5. Dampak Lingkungan di sekitar lokasi ladang minyak PetroChina

Dampak lingkungan di wilayah ladang minyak Desa Rahayu sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum terjadinya insiden penembakan oleh aparat saat demonstrasi penuntutan ganti rugi keracunan H₂S bulan Mei 2002. tapi saat itu belum terlalu menjadi perhatian masyarakat. keberanian masyarakat untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan dan pertanian justru muncul setelah berjalannya program Community Development yang dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dengan pihak perusahaan.

Usaha masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan mengalami kesulitan dan menempuh waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang didapat, di bawah ini proses bagaimana tuntutan tersebut berlangsung:

- Pada tanggal 14 Februari 2003, Masyarakat melayangkan surat tuntutan ganti rugi mengenai dampak lingkungan yang menurunkan produksi pertanian dan limbah yang dibuang ke sawah milik petani Masyarakat desa Dukuh Gandu. Dalam surat tuntutan tersebut dilampiri nama-nama dan tandatangan para petani yang terkena dampak.⁷¹
- Tidak lama kemudian Pihak Petrochina membalas surat tuntutan tersebut bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak PetroChina tanggal 18 Februari 2003 menunjukkan tidak ada dampak terhadap tanaman dan limbah. Di surat pihak PetroChina juga dilampirkan tanda tangan beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.
- Setelah mendapatkan surat jawaban dari PetroChina, masyarakat mengirim surat kembali. Salah satu hal penting di surat tersebut disebutkan, masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu yang berdempetan langsung di sebelah timur, sawah mereka menjadi tempat pembuangan limbah. Dan hingga saat itu masyarakat tidak pernah mendapatkan fasilitas CD dan juga tidak pernah menuntut.⁷²
- Pada bulan Maret 2003, telah dibuat surat pernyataan bahwa air buangan dari PetroChina tidak sama sekali mengakibatkan dampak lingkungan. Yang ganjil dalam surat pernyataan tersebut adalah tidak adanya pihak yang dirugikan/menuntut ikut menyatakan pernyataan.⁷³ Nama yang tercantum justru warga lain yang tidak terkena imbas limbah tersebut dan sering mendapatkan program CD PetroChina yang selama ini telah dijalankan.
- Setelah mendapatkan surat dari PetroChina yang menjelaskan bahwa dampak lingkungan yang dituntut masyarakat tidak terbukti, masyarakat mengirim surat

⁷⁰ Jawa Pos 18 September 2002

⁷¹ surat tuntutan masyarakat Dukuh Gandu yang ditandatangani oleh Camat Soko Kusmindar tertanggal 14 Februari 2003 terlampir.

⁷² Surat balasan masyarakat atas surat PetroChina tanggal 29 April 2003

⁷³ Surat pernyataan tertanggal ... (kosong) bulan Mei 2003 terlampir

kembali melalui kecamatan dan ditandatangani Camat Soko. Salah satu point penting dalam surat tersebut menyebutkan walaupun hasil pemeriksaan tiem PetroChina menunjukkan bahwa tidak ada dampak lingkungan, tapi dalam kenyataannya masyarakat terus mengalami kerugian.⁷⁴

- Pihak PetroChina membalas kembali surat dari masyarakat yang menjelaskan tetap hasil penelitian tidak membuktikan adanya dampak. Surat tersebut juga dilamiri uji laboratorium dari Sucopindo Surabaya.

Demikian kronologi tuntutan masyarakat yang hingga kini tidak menemukan hasil. Namun demikian ada bukti kuat bahwa PetroChina sendiri belum memiliki surat AMDAL yang sah. Dalam kementerian lingkungan hidup sampai tanggal 23 April 2004 ditemukan bahwa PetroChina masih dalam proses Perbaikan Dokumen AMDAL dan Revisi RKL-RPL.⁷⁵ Hal ini menandakan sebenarnya secara hukum suatu perusahaan mana dan apapun belum boleh melakukan produksi bila belum memenuhi persyaratan hukum. Di sisi lain PetroChina sudah melakukan produksi/pengeboran sudah beberapa tahun.

4.6. Tata pemerintahan dan korupsi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai tidak transparan mengenai apa yang sedang berlangsung di Bojonegoro khususnya mengenai investasi industri minyak. Ketidaktransparan ini ternyata tidak hanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Mojodelik dan Jambaran yang sedang membutuhkan sekali informasi mengenai keberadaan Exxon Mobil Oil di wilayah mereka, tetapi juga dalam tubuh birokrasi pemerintahan sendiri. Beberapa dampak tidak adanya transparansi ini antara lain :

1. Berdirinya Semar yang didirikan oleh 9 lurah yang akan terkena pembebasan tanah untuk MCL. Saat ini bukan lagi 9 lurah tapi bertambah menjadi 14 lurah. Beberapa waktu lalu para 14 lurah membuat pernyataan bahwa apabila bupati tidak mengkoordinasikan mengenai akan berproduksinya MCL, maka 14 lurah tersebut akan melakukan demonstrasi ke kabupaten. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sama sekali koordinasi bupati dengan jajaran di bawahnya. Demonstrasi yang akan dilakukan 14 lurah juga dipicu karena ramainya berita dari mulut ke mulut mengenai MCL, sedangkan lurah sebagai birokrat yang paling bersentuhan dengan masyarakat tidak tahu informasi yang valid dan resmi dari pemerintah daerah langsung.⁷⁶
2. Munculnya koalisi-koalisi elit untuk mengakses MCL. Koalisi ini bukan saja hanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan masyarakat, tapi militer dan polisi secara individual pun ikut bergabung dengan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan oleh

⁷⁴ Surat balasan dari warga yang dilampiri tandatangan terlampir tetanggal 29 April 2003.

⁷⁵ www.menlh.go.id/asdep kajian dampak lingkungan.

⁷⁶ Sumber LSM local, Lestari

Guyub Bojonegoro dengan Kongres Petroleum Bojonegoro, ataupun Bupati Santoso yang melakukan pertemuan dengan Guyub Bojonegoro, maupun dengan PT Indonadi Perdana yang dilindungi oleh anggota militer baik di Jakarta maupun di Bojonegoro.

3. Di tubuh pemerintahan sendiri, Wakil Bupati merasa tidak dilibatkan oleh Bupati mengenai perkembangan ExxonMobil Oil yang sebentar lagi akan berproduksi. Sehingga jangankan melibatkan para Lurah di lokasi ladang minyak yang menuntut transparansi pemerintah tentang kontrak ExxonMobil Oil, dengan wakil bupati saja Bupati tidak ada komunikasi.
4. Pemerintahan sendiri tidak tanggap dengan isu pembebasan tanah yang sedang ramai terjadi di wilayah lokasi Bantu Urip dan Jambaran. Secara hukum administrasi negara, pemerintah seharusnya melakukan tugasnya untuk mengayomi masyarakat yang sedang diombang ambing informasi tentang pembebasan tanah. Dalam hal ini justru Bupati Bojonegoro, Pak Santoso cenderung menyalahgunakan jabatan, yaitu bertemu dengan pihak investor yang akan menjadi broker pembebasan tanah.
5. Pada level anggota legislatif, yang didapat mengenai kapan waktunya ExxonMobil beroperasi berbeda-beda. Salah satu anggota DPRD mengatakan bahwa belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ExxonMobil, sedangkan anggota DPRD yang lain mengatakan sudah ada penandatanganan kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ExxonMobil.

4.7. Dampak Keterlibatan Militer dalam bisnis eksploitasi minyak Bojonegoro

Dampak keterlibatan militer dalam bisnis perusahaan eksploitasi minyak tidak terlihat secara langsung di masyarakat. Namun demikian, keterlibatan militer ini menjadi salah satu elemen yang turut memperkeruh kondisi sosial, ekonomi dan politik di masyarakat baik di level elit masyarakat maupun di masyarakat sekitar lokasi eksploitasi minyak. Beberapa dampak yang timbul dari keterlibatan militer tersebut antara lain ;

- a. Masuknya PT Indonadi Perdana yang di dalamnya terdapat purnawirawan sebagai pelindung PT tersebut, sebagai broker pembebasan tanah di wilayah Mojodelik dan Jambaran, berdampak terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Handoyo (red) yang menjadi operator PT tersebut mengklaim telah memegang tanah seluas 182 ha yang akan dibebaskan untuk eksplorasinya MCL. Di sisi lain organisasi masyarakat FORKOMASBAJA dan SPBU sedang berusaha melakukan penyadaran untuk bersikap kritis terhadap keberadaan MCL sebagai perusahaan pelaksana dari investor perusahaan transnasional Exxon Mobil Oil.
- b. Pertemuan Bupati Santoso dengan para pihak PT Indonadi Perdana⁷⁷ mengakibatkan tidak transparannya dalam proses tender pembebasan tanah seluas 675 ha di wilayah

Mojodelik dan Jambaran. Pernyataan Handoyo yang menirukan ucapan Bupati Santoso bahwa “ *kalau Exxon jadi melakukan pembebasan tanah, saya memprioritaskan PT Indonadi Perdana sebagai perusahaan pertama yang menjadi pihak ketiga antara masyarakat dengan Exxon*”.

- c. Dampak direkrutnya mantan Dandim Bojonegoro dan mantan Kapolres Bojonegoro oleh Petrochina sebagai kepala security memiliki dua sisi. Di satu sisi, perekrutan ini menguntungkan PetroChina karena mampu meredam resistensi masyarakat sekitar yang baru saja terjadi insiden penembakan dalam demonstrasi. Di sisi lain masyarakat menjadi takut untuk bersikap kritis terhadap PetroChina.
- d. Hasil wawancara security MCL yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang masuk menjadi security MCL melalui para personil militer dan polisi berdampak pada tidak setaranya hubungan antar personil security tersebut.

⁷⁷ handoyo (bukan nama sebenarnya)

Bab V

Kesimpulan

Hingga saat ini Mobil Cepu Ltd. belum masuk proses produksi. Data terakhir menjelaskan bahwa perjanjian kesepakatan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 yang ditawarkan Pertamina kepada ExxonMobil Oil sudah final. Keputusan terakhir yang masih ditunggu adalah dari pihak pemerintah, apakah pemerintah menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, belum jelasnya keberlanjutan MCL di Bojonegoro, khususnya di wilayah sekitar Banyu Urip dan Jambaran membuat resah masyarakat. pemerintah daerah sendiri terlihat kurang insiatif untuk mempertanyakan perkembangan tersebut kepada pemerintah pusat ataupun menenangkan masyarakat di wilayah tersebut yang sama sekali tidak terinformasikan baik oleh minimnya jangkauan berita maupun informasi dari pemerintah sendiri.

Inverstasi ExxonMobil Oil di Banyu Urip dan Jambaran sendiri adalah jenis investasi yang sangat besar dan sekaligus high technology. Dalam hal ini banyak kalangan memiliki kepentingan terhadap investasi ini, baik pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan seperti pihak-pihak dari unsur kepolisian dan militer.

Keterlibatan militer dan polisi dalam bisnis eksplloitasi minyak di Bojonegoro sendiri terlihat malalui banyak cara, antara lain melalui investasi yang di dalamnya dilindungi militer, melalui paguyuban yang masuk dengan pendekatan birokratis dan kemasyarakatan, melalui pengamanan perusahaan eksploitasi tersebut. keterlibatan militer dan polisi juga tidak lepas dari sikap pemerintah dan sebagian masyarakat yang seakan tidak menolak dengan keterlibatan militer tersebut.

Kondisi ekonomi yang sangat bergantung dari pertanian juga menjadikan masyarakat tidak bisa dibendung untuk menjual tanahnya kepada MCL. Pendapatan yang tidak pernah memuaskan dari menanam padi, membuat masyarakat berpikir pragmatis untuk

mendapatkan uang yang sedikit lebih besar dari menjual tanah mereka kepada MCL. Hal ini terbukti dari kesulitan yang dihadapi organisasi SPBU dan FORKOMASBAJA dalam mengorganisir masyarakat untuk memiliki daya tawar yang tinggi terhadap MCL. Selain itu tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat yang minim mengenai invertasi ladang minyak ini juga menjadi salah satu hambatan. Menyadari kondisi ini, SPBU dan FORKOMASBAJA mengharapkan peran pemerintah daerah untuk menjadi pihak ketiga/fasilitator antara masyarakat dengan investor. Sayangnya pemerintah tidak memiliki kesadaran hal tersebut. Temuan yang didapat malah menunjukkan bahwa banyak pihak pemerintah mengambil keuntungan dari investasi tersebut, baik menjadi tengkulak langsung maupun tidak langsung maupun bekerja sama untuk kepentingan pribadi dan kelompok untuk mengakses tender-tender ExxonMobil Oil.

Rekomendasi

Investasi ExxonMobil Oil adalah pilihan yang dapat diterima, walaupun banyak pihak menyarankan agar Pertamina sendiri yang mengelola ladang minyak di Blok Cepu ini. Sayangnya, invertasi ExxonMobil Oil ini lebih banyak dinikmati oleh elit birokrat, militer, polisi dan sipil. Dukungan para pihak untuk mengkritisi hal ini menjadi keharusan agar hak-hak masyarakat mendapatkan porsinya.

Militer dan polisi sebagai institusi negara haruslah kuat. Dalam artian bahwa sebagai institusi yang menjaga keamanan negara, militer dan polisi harus diletakkan pada posisinya yang sebenarnya. Keterlibatan militer dan polisi dalam mendirikan atau membekingi perusahaan-perusahaan dengan cara menyalahgunakan kewenangan harus dihapuskan agar militer dan polisi itu menjadi kuat secara institusional, bukan sebagai “penguasa bayangan” yang selama ini terjadi.

Wassalam,

Bojonegoro, Februari – Maret 2004

Lampiran-lampiran

Surat-surat

Data Pendukung

Peta lokasi

**Daftar Nama Warga Dukuh Gandu Desa Rahayu
yang terkena limbah dan menuntut ganti rugi**

25 Februari 2003

No	Nama	Alamat
1.	Sauji	DK. Gandu, Desa. Rahayu
2.	Syahuri	DK. Gandu Desa. Rahayu
3.	Jaelan	Idem
4.	Sutikno	Idem
5.	Karsidin	Idem
6.	Kadam	Idem
7.	Warijo	Idem
8.	Muhadi	Idem
9.	Salim	Idem
10.	Matyaji	Idem
11.	Bukhari	Idem
12.	Lantip	Idem
13.	Sanaji	Idem
14.	marsito	Idem
15.	Tamsir	Idem
16.	Muntari	Idem
17.	Suardi	Desa. Sokosari
18.	Sukir	Desa. Bulurejo
19.	Suyitno	Desa. Rahayu
20.	Kastono	Desa. Rahayu
21.	Suwito	Desa. Bulurejo

Sumber: Surat tuntutan masyarakat Dukuh Gandu, Desa Rahayu 25 Februari 2003

Daftar Korban dan kerugian Insiden Penembakan Desa Rahayu, 1 Mei 2002

Korban Tembak Peluru Karet	Korban Kekerasan/ Pemukulan	Kerugian Pengrusakan Motor
1. Karnoto, 43 th	1. Syahuri, 40 th	1. GL Pro no. polisi : (S
2. Suparji, 25 th	2. Sumijan, 40 th	5395 HC)
3. Sutaji, 32 th	3. Agus budiono, 25 th	2. V 80 (S 7401 EB)
4. Rohmad, 34 th	4. Tamsuri, 19 th	3. Supra X (S 3501 PA)
5. Kardi, 48 th	5. Muntari, 45 th	4. Fiz R (S 8506 EI)
6. Kanan, 39 th	6. Arobi, 25 th	5. Tornado (S 8506 EI)
	7. Sujito, 22 th	6. Alfa (S 6079 EH)
	8. Kasiman, 35 th	7. Kaze R (S 5341 HC)
	9. Jono 47 th	8. Crystal (S 4922 E)
	10. Masdam, 50 th	9. Kaze R (S 6255 EI)
	11. Jamin, 35 th	10. RC 100
	12. Guntamam, 27 th	11. Sanex (S 5956 M)
	13. Kasmiran, 43 th	12. Prima (S 5877 ED)
	14. Parlim, 27 th	13. Crystal (S 4893 EG)
		14. Star (S 4592 N)
		15. RX (S 4913 K)

Sumber: Radar Bojonegoro, 2 Mei 2002

Kronologi Insiden Penembakan pada Demonstrasi Pertamina - Devon Energy Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban

No.	Hari/Tgl./ Bulan	Keterangan/ Kejadian	Pihak yg terlibat	Hasil / Evaluasi
1	Senin, 29/4/02 Pk. 20.00	Pertemuan di Rumah Sekdes Rahayu, dg beberapa warga	<ul style="list-style-type: none"> warga rahayu API LSPM WALHI 	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan u/ segera bertemu dgn masy. Di Balai Desa. Sekitar 1 jam pert. Di datangi 2 Intel dari Polsek Soko
	Pk. 22.15	Kumpul di Balai Desa, perkenalan dan menjelaskan kapasi-tas dan apa yang diharapkan o/ warga dengan kehadiran LSM/ ORNOP.	<ul style="list-style-type: none"> Warga Kades + Sekdes Perangkat Desa Anggota BPD Walhi+LSPM+API 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada dialog yang dinamis, karena peran pendapat diambil alih semua oleh Kades dan Sekdes
2	Selasa, 30/4/02 Pk. 10.15	Aksi massa Ds. Rahayu ke kantor Administrasi Devon di Jl. Teuku Umar Bojonegoro. Massa bawa perlengkapan Spanduk, poster. Bergerobol di depan pintu.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Massa sekitar 2 Truk ditambah 30- an naik sepeda motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Aksi sangat cair, tidak ada kepemimpinan dan kualitas aksi.
	Pk. 10.45	Di terima dialog oleh pihak Devon	<ul style="list-style-type: none"> Devon; Hariyanto dan bambang. Kepala Security dan Humas. NGO; FKPB, Walhi, LSPM, API. Masy; Kades, Sekdes, BPD, Karang Taruna, Ta'mir masjid 	<ul style="list-style-type: none"> Perundingan Deadlock !

Sambungan

**Kronologi Insiden Penembakan
pada Demontrasi Pertamina - Devon Energy
Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban**

No.	Hari/Tgl./ Bulan	Keterangan/ Kejadian	Pihak yg terlibat	Hasil/Evaluasi
	Pk. 11.10 – 14.00	Massa balik ke Desa Rahayu	Masyarakat dan seluruh perangkat Desa	Kumpul di Balai Desa Rahayu, menyatukan pendapat u/ melakukan langkah selanjutnya. Menyiapkan rencana aksi blokade di depan punti masuk Mudi I dan Mudi II (lokasi eksploitasi minyak dan penampungannya)
	Pk. 15.00	Memasang terob di depan pintu masuk Mudi I dan Mudi II, massa melakukan aksi blokade dengan duduk- duduk.	Warga dan korlap masing-masing aksi, Jumlah massa di masing-masing Lokasi +_ 50 orang.	Tidak melakukan aksi apa-apa selain duduk- duduk
3	Rabu, 1/5/02 Pk. 10.00 – 14.00	Perjalanan pulang balik ke surabaya ...(kehabisan logistik)		
	Pk. 22.45	Terima kabar dari Bojonegoro, kalo aksi Blokade di depan pintu Tambang telah di represif oleh aparat, beberapa warga luka tembak dan memar akibat pukulan pentungan dan popor senjata.	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dipukul warga yang sedang berada di lokasi maupun yang kebetulan lewat disekitar lokasi. • Aparat Polisi dari POLRES Tuban dan POLWIL Bojonegoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada data kronologis tersendiri.
4	Kamis, 2/5/02 Pk.11.00 – 15.30	Perjalanan menuju Bojonegoro, sampai di lokasi langsung rapat di Sekretariat LSPM sampai dg pk. 18.00	<ul style="list-style-type: none"> • YPSDI, Walhi, Pusham UA, Forsam FH UA • LSPM, API, FKPB. 	Pembagian kerja, siapa melakukan apa pasca insiden penembakan rahayu. Ada pernyataan sikap bersama. (terlampir)

Sambungan
Kronologi Insiden Penembakan
pada Demonstrasi Pertamina - Devon Energy
Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban

No.	Hari/Tgl./ Bulan Pk. 21.00 – 00.15	Keterangan/ Kejadian	Pihak yg terlibat	Hasil/Evaluasi
5	Jumat, 33/ 5/02 Pk. 19.30	Bikin pers release bersama kawan-kawan ORNOP di Bojonegoro. Salah satu kawan Aliansi Ornop diminta u/ telpon ke Sekdes agar tahu perkembangan terakhir.	Walhi Jatim, API, LSPM., FKPB (ALIANSI ORNOP PEDULI INSIDEN RAHAYU). Affan, dari LSPM	Di muat di harian Duta Masyarakat. Ternyata ada berita dari istri sekdes kalo Sekdes dan Kades sedang ada pertemuan di POLSEK Soko, di pertemukan dg perwakilan manajemen Devon dari Jakarta, bersama Muspida, Muspika, Denpom, dan Polres Tuban.
6	Sabtu, 4/5/ 02 Pk. 19.00 – 00.05	Pertemuan di Desa Rahayu, di rumah Pak Sukisno, wakil ketua BPD Ada Informasi bahwa sekitar pukul 11.00 – 14.30 ada pertemuan antara perwakilan warga rahayu.	Di ikuti sekitar 50-60 orang yang hadir. Dari NGO yang hadir LBH Sby, Walhi Jatim, LSPM, API. Pejabat desa Rahayu dengan Bupati Tuban di Rumah Dinas Bupati dengan Bupati aparat Muspida Tuban.	Diskusi partisipatif dengan melakukan analisi persoalan ; Apa masalah? Siapa Lawan? Apa Kekuatan kita? Ada laporan (terlampir) Tidak diketahui hasilnya, karena sewaktu ada pertemuan antara warga dengan ORNOP juga tidak terbuka.

Sambungan

**Kronologi Insiden Penembakan
pada Demontrasi Pertamina - Devon Energy
Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban**

No.	Hari/Tgl./	Keterangan/ Kejadian	Pihak yg terlibat	Hasil/Evaluasi
7	Minggu, 5/ 5/02 Pk. 11.30 – 15.30 Pk. 19.00 – 23.00	Ke Daerah kec. Ngasem Bojonegoro, lokasi eksplorasi pertambangan EXXON Mobil dan akan segera melakukan operasi Eksplorasi. Ke Desa Rahayu, Cross Chek persiapan dialog NEGO" warga dengan Devon hari senin.		

Wawancara Sofyan (red), Security Mobil Cepu Ltd.

1. Jumlah personil security MCL ada 165 orang
2. Manager security adalah purn AL Brigjend bintang satu Sahala Tambunan
3. Proses perekrutan karyawan security antara lain sebagai berikut
 - melalui lurah/camat/bupati dengan membayar uang antara 15-20 juta.
 - melalui karyawan Exxon sendiri
 - melalui pendaftaran personal ke kantor pusat Exxon di Jakarta
 - melalui Polres. Ada 6 orang mantan karma yang mendapat jatah dari Polres yang dibawa oleh mantan Kapolres Endang Sofyan periode 2000. 6 orang tersebut adalah : Mustain, Samuri, Nurjana, gunari, kariman dan Dasar.
 - melalui polisi secara personal karena termasuk keluarga polisi. Antra lain: Edi Supriyoso, Gunaryo Dianto Mugiharso, Ugik Nuryono dan Johan Rofiq
 - melalui tentara, yaitu :
 - Teguh Imam, masuk karena dibawa oleh Permanu (Polisi Militer)
 - Agus Samandi, dibawa oleh Alex, intel KODIM
 - Ujang Gristiantoro, dibawa oleh Koramil Padangan
